

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul,Latif dan Hasbi Ali.*Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajagrafindo Persada. 2004.
- Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Bagir Manan.*Peraturan Kebijaksanaan*. Jakarta: Dewan Pers. 1994.
- Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.1994.
- Carlton Clymer.*Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta:RajagrafindiPersada. 2014.
- Chryshnanda DL.*Diskresi dan Korupsi*. Jakarta : Balai Pustaka. 2011.
- Daniel S. Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia. 2014.
- Delfgaauw.*Sejarah Ringkas Filsafat Barat*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992.
- E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 1998.
- H.D. Stout . *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.2011.
- HasanAlwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :BalaiPustaka. 2005.
- Hasibuan Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- I Dewa Gede Atmadja.*Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang : Setara Press dan Anggota IKAPI. 2015.
- Indroharto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Jakarta : Universitas Indonesia. 1992.
- J.Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*., Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003.
- L.J.A. Damen. *Bestuursrecht, System, Bevoegdheid, Handhaving, BJU Boom Juridische Uitgevers*, Den Haag : Tweede Druk. 2005.

- Lawrence M. Friedman. *American Law: An Introduction*. Jakarta: PT. Tatanusa. 2001.
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradiya Paramitha. 1991.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundan-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*. Yogyakarta: Kanisius. 1998.
- Marcus Lukman. *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah*. Bandung: Universitas Padjajaran. 1996.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia dan Sinar Bakti. 1998.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2009.
- Muhammad Yasin dan Laode Rudita. *Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2017
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang :Universitas Diponegoro Press. 1995.
- Nata Saputra. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali. 1998.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1994.
- Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Admnistrasi Negara*. Jakarta:Ghalia Indonesia. 1994.
- Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan. *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press. 2014.
- Roger Cotterrell. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bandung: Nusa Media. 2012.
- Ronny Lihawa. *Akuntabilitas Politik Dan Kinerja Polri*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum UI. 2007.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.

Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya : Airlangga University Press. 2005.

Soebroto Brotodirejo. *Polisi Sebagai Penegak Hukum*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI. 1984.

Soehino. *Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta Anggota IKAPI. 2009.

Soerjano Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 2007.

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005.

Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2005.

Yesmil Anwar. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo. 2008.

Yopie Morya Immanuel Patiro. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung; Keni Media. 2012.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

C. JURNAL

Alsyam, Arfiani. 2016. Efektifitas Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Publik Berdasarkan Hukum. Universitas Andalas.

D. MEDIA MASSA DAN INTERNET

Koran Harian Haluan

Koran Harian Riau Pos

<http://medan.tribunnews.com/2016/09/19/video-pungli-pengendara-empat-polisi-labuhan-batu-diperiksa-propam-polda-sumut> (Diakses pada tanggal 2 Mei 2017)

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/ite580efd71915a7/kini--ada-aplikasi-e-tilang-untuk-berantas-pungli-oknum-polanta> (Diakses pada tanggal 2 Mei 2017)

<http://hukumonline.com/berita/baca/It585a7019e0a5d/perma-perkara-tilang-terbit-ini-poin-yang-layak-anda-ketahui> (Diakses pada tanggal 2 Mei 2017)

<http://news.m.klik.positif.com/baca/1164/tilang-elektronik-belum-merata-ini-penjelasan-polda-sumbar> (Diakses pada tanggal 2 Mei 2017)

<https://padangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/4> (Diakses pada tanggal 18 Februari 2018)

